

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

Bertha Lubis

berths.lubi3@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dilakukan di Kota Cimahi, terkait dengan Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, adalah dikarenakan Kota Cimahi, termasuk wilayah yang terkena dampak penularan Covid-19 di provinsi Jawa Barat. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan mencari serta mendapat data sejauh mana kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Cimahi yang dilakukan oleh jajaran aparatur pemerintah Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data diperoleh dari media cetak dan media elektronik serta dokumentasi-dokumentasi. Hasil yang diperoleh bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi, adalah dimana Pemkot Cimahi untuk mendukung pelaksanaan penanganan pandemic Covid-19, telah melakukan *refocusing* dan relokasi anggaran APBD Kota Cimahi, hal ini dilakukan guna mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan mengantisipasi penularan Covid-19 yang semakin meluas di Kota Cimahi. Kesimpulan yang diperoleh, dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Cimahi untuk sementara telah dapat mengendalikan percepatan penularan Covid-19. Dan untuk mengantisipasi ke depan jika Covid-19, belum melandai di tahun 2021 Pemkot Cimahi mengalokasikan APBD lebih besar bagi penanganan Covid-19, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The purpose of the research conducted in Cimahi City, related to the Implementation of the Covid-19 Pandemic Handling Policy, was because Cimahi City, including the areas affected by the Covid-19 transmission in West Java province. So that researchers want to know and look for and get data on the extent of the policies for handling Covid-19 in the City of Cimahi carried out by the ranks of the Cimahi City government apparatus. The method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Sources of data obtained from print media and electronic media as well as documentation. The results obtained are that the implementation of policies carried out in handling Covid-19 in Cimahi City, is where the Cimahi City Government to support the implementation of handling the Covid-19 pandemic, has carried out *refocusing* and relocating the Cimahi City APBD budget, this is done to support the acceleration of handling Covid-19 and anticipate transmission. Covid-19 which is increasingly widespread in Cimahi City. The conclusion obtained, with this policy, the Cimahi City Government has temporarily been able to control the acceleration of the transmission of Covid-19. And to anticipate in the future if Covid-19 does not slow down in 2021, the Cimahi City Government allocates a larger APBD for handling Covid-19, and increasing the economic growth of the City of Cimahi.

Keywords: Policy implementation, Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Musibah kesehatan yang diakibatkan oleh Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi virus corona disebut Covid-19 (Corona virus disease 2019) dan pertama kali dipertemukan di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah untuk menekan penyebaran virus ini.

Persebaran virus Corona di Provinsi Jawa Barat saat ini terjadi di dua klaster berbeda, dimana klaster pertama berada di Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi sebagai klaster yang berdekatan dengan Ibukota Negara yaitu Provinsi DKI Jakarta. Kemudian klaster kedua merupakan wilayah Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

pertanggal 12 April 2020 Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini melonjak menjadi 15 orang maka dari itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bandung Raya terhitung mulai hari Rabu, 22 April 2020 pukul 00.00 WIB. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Wilayah Bandung Raya.

Dengan adanya kebijakan PSBB di Wilayah Bandung Raya pemerintah daerah Kota Cimahi harus melengkapi sejumlah persiapan guna menghadapi PSBB di Wilayah Bandung Raya tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah Kota Cimahi melakukan pergeseran APBD untuk melaksanakan kebijakan PSBB dalam rangka penanganan virus Covid-19 di wilayah Kota Cimahi.

Kota Cimahi dalam menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Cimahi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus covid-19 di wilayah Kota Cimahi. Strategi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyusun dan menghimpun anggaran dalam rangka pelaksanaan PSBB pada APBD berjalan tahun 2020 Kota Cimahi.

Musibah Kesehatan dengan adanya virus corona, dimana yang lebih dikenal dengan Covid-19 yang terjadi dari tahun 2020 sampai sekarang ini, telah membuat Bangsa ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan khususnya, masalah kesehatan dan masalah ekonomi bahkan berdampak kepada dibatasinya ruang gerak Masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan dikarenakan pemerintah daerah Kota Cimahi mencegah adanya

penularan secara massif di setiap wilayah Kota Cimahi.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Cimahi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Cimahi”.

Beberapa penelitian sebelumnya menjadikan rujukan dalam penelitian ini, namun kesimpulan dan hasilnya sangat berbeda dan dapat dijelaskan di halaman kajian metodologi penelitian.

Untuk lebih fokus dalam melakukan penelitian di Kota Cimahi, peneliti merumuskan masalah diantaranya:

1. Sejauh mana Implementasi Kebijakan yang dilakukan Pemkot Cimahi dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi;
2. Hambatan apa-apa saja yang dijumpai dalam implementasinya dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi;
3. Upaya apa yang dilakukan Pemkot Cimahi dalam mengatasi hambatan-hambatan dimaksud.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan data dukung terkait implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di kota Cimahi;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai di saat dilaksanakannya implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi;
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan Pemkot Cimahi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah referensi dari berbagai buku-buku, artikel-artikel, disertasi tesis yang tertulis dalam karya ilmiah, yang berkaitan erat dengan penelitian yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dimana ide-ide dan gagasan dapat bersumber dari peneliti itu sendiri dan dapat juga bersumber dari berbagai kumpulan –kumpulan pengetahuan dari hasil kerja sebelumnya yang dikenal dengan literature atau pustaka. Yang dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan teoritis di dalam penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang dapat dijadikan landasan untuk pemecahan masalah, dikaitkan dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori dimaksud diantaranya:

Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Edward III, dalam Sujianto (2008:38-45), bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sebaik apapun kebijakan itu dibuat dan dirancang serta dirumuskan tanpa ada dukungan

sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Tanpa sumber daya yang memadai suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Sedangkan menurut Kamus Webster dalam Solichin Abdul Wahab pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses

melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekret presiden).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Kebijakan terkait juga dengan proses pembuatan kebijakan. Dunn mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut aturan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan proses dimana setelah masalah publik masuk dalam agenda kebijakan maka berbagai opsi dirancang untuk mengatasinya. Selanjutnya pemerintah membuat beberapa pilihan kebijakan dan menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa

dari cara untuk mengimplementasikan adalah dengan proses *top-down* yaitu proses yang menekankan bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara efektif dari pembuat kebijakan ke sasaran. Cara yang kedua menggunakan pendekatan *bottom-up* yaitu implementasi kebijakan berdasarkan perspektif sasaran kebijakan.

Terkait dengan Penanganan

Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan. Penanganan merupakan tindakan lebih lanjut dari sebuah kebijakan yang ditetapkan, sehingga diketahui seberapa besar capaian yang dihasilkan atas penanganan yang telah dilakukan.

Pandemi Covid-19

Merupakan wabah kesehatan yang ditimbulkan oleh corona virus, di akhir tahun 2020, yang mewabah hampir diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran dan penularannya dapat dilakukan melalui kontak langsung sesama manusia. Sehingga saat ini penularan penyebarannya semakin massif diseluruh dunia.

Penyebarannya menyerang saluran jaringan pernapasan manusia, sehingga untuk mencegah semakin massif penularannya, dapat dicegah melalui disiplin dengan menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak aman, memakai masker jika keluar rumah atau sedang sakit, dan sering mencuci tangan di air mengalir. Sesuai anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu penting dan mendesak, agar terhindar dari penularan Covid-19.

Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, Pemkot Cimahi, berbuat dan bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku terkait dengan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data-data yang tertulis dari hasil pengamatan perilaku pada saat dilakukannya observasi di lapangan sehingga mendapatkan data dan informasi baik lisan maupun tertulis. (Moleong, 2002). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pendekatan ini diarahkan

pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Dimana wawancara merupakan interaksi dua arah dari peneliti dengan yang diteliti untuk memperoleh informasi terkait dengan Implementasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), dan merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dan diskusi dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Nazir, 1999).

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Maka metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dalam penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

SUMBER DATA

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, yaitu kontak secara langsung dengan Tanya jawab dengan informan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, melakukan observasi kelapangan dengan mengamati secara langsung dari dekat kegiatan yang dilakukan, dengan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian, dari perilaku obyek yang diteliti, guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang

sedang diteliti. Pengumpulan data ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Adapun komponen dalam analisis data meliputi: Komponen dalam analisis data:

1. Reduksi Data

Memilah data yang layak dan dapat dijadikan bahan kajian yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

TEKNIK KEABSAHAN DATA

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia, sehingga untuk menguji dan memeriksa keabsahan data, dalam penelitian kualitatif dan untuk menguji kredibilitas data penelitian,

peneliti menggunakan teknik triangulasi.. Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel: 1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Simpulan/hasil
1.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 di desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Oleh: Helly F Kolondam dkk.	Keberhasilannya diukur dari 4 indikator teori Edward III yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur Birokrasi.
2.	Penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. Dilakukan oleh: Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P Universitas pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko).
3.	Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana Oleh: HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar	Tinjauan paradigmatis tentang apa substansi (ontologi), mengapa (aksiologi) dan bagaimana (epistemologi) implementasi kebijakan menunjukkan konsistensi dan kolaborasi pemikiran para pakar dalam menjelaskan substansi, urgensi dan signifikansi, serta wahana atau konteks implementasi kebijakan dilihat dari beragam perspektif, termasuk tata cara dan acara atau implementasi kebijakan itu sendiri.
4.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan oleh Neti Sunarti	Kesimpulannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan mewujudkan Masyarakat madani.
5.	Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik bagi Penyandang Cacat. Oleh:Ika Devy Pramudiana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merespon tuntutan perkembangan modernisasi perikanan, nelayan di Kota Baubau umumnya memilih strategi adaptasi. Strategi ini dilakukan para nelayan melalui motorisasi perahu (armada) tangkap dalam berbagai jenis dan ukuran, adopsi inovasi alat tangkap moderen, dan membangun hubungan kerja (kemitraan) dengan pengusaha perikanan moderen

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Cimahi.

HASIL DAN BAHASAN

Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Cimahi, dilakukan dengan Pemkot Kota Cimahi, membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 di Kota Cimahi, dengan melibatkan aparat keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI serta SATPOL PP, dan adanya dukungan dari partisipasi Masyarakat Kota Cimahi. Kota Cimahi merupakan masuk dalam zona merah Covid-19 pada awal mulanya, dimana penularan dan penyebaran Covid-19 sangat cepat sekali, sehingga terkonfirmasi positif warga Masyarakat yang terkena Covid-19 sampai akhir Januari 2021, sebanyak 2.656 orang dan yang sembuh sebanyak 2.127 orang, sedangkan meninggal sebanyak 65 orang, kasus positif aktif sebanyak 464 orang.

Sumber: Data diperoleh dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Cimahi.

Untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19, Pemkot Kota Cimahi telah melakukan beberapa kebijakan yang meliputi, dengan pelaksanaan PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2 serta PSBB transisi menuju new normal, Pemkot Kota Cimahi untuk mengatasi warga Masyarakat yang terkonfirmasi positif, Pemkot Kota Cimahi telah menambah ruang-ruang isolasi perawatan bagi pasien Covid-19, dan menambah tenaga medis yang merawat pasien-pasien Covid-19, serta menambah peralatan medis yang memenuhi standar bagi penanganan Covid-19. Namun kota Cimahi merupakan Kota yang berbatasan dengan beberapa wilayah di Bandung Raya, misalkan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung, maka dalam penanganan Covid-19 perlu melakukan sinergitas kerjasama dengan daerah-daerah tersebut

secara sinergis, karena wilayah ini saling berdekatan dan sebagai tetangga dekat dalam wilayah Bandung Raya. Sehingga dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19, tentunya harus adanya pandangan dan persepsi yang sama di wilayah Bandung Raya.

Dari 4 (empat) Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Bandung Raya, Kota Cimahi termasuk dalam penanganan Covid-19, sudah sangat baik, karena pemerintah daerah dan jajaran sangat tanggap dan cepat melakukan berbagai penanganan untuk kebutuhan penyebaran dan penularan Covid-19. Walaupun angka positif sampai dengan akhir Mei 2021 mencapai kasus konfirmasi aktif Covid-19 Kota Cimahi sebanyak 263 orang. Jumlah kontak erat dan suspek yang masih dalam perawatan sebanyak 195 orang. Kota kecil dengan jumlah penduduk padat, 614.304 jiwa (BPS, 2019), ini memiliki total kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 5.759 jiwa, sebanyak 5.362 di antaranya sembuh, namun tercatat ada 134 orang meninggal, serta ada 15 orang meninggal dengan status probable.

Kenaikan angka positif selama 4 (empat) bulan ini dikarenakan adanya lonjakan kasus di Bandung Raya, dimana Kota Cimahi merupakan Kota yang masuk dalam wilayah Bandung Raya. Namun dari 4 Kabupaten/Kota di Bandung Raya, Kota Cimahi termasuk sangat baik dalam penanganan Covid-19 bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Bandung Raya.

Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep dasar implementasi kebijakan, untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan bahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Cimahi, dilakukan oleh jajaran aparaturnya Pemkot Cimahi, dibantu oleh aparaturnya keamanan yang melibatkan TNI, POLRI dan SATPOL PP yang mendapat tugas dari gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Cimahi, yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada warga masyarakat untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yang meliputi, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Serta melakukan penertiban kepada para pedagang dan UMKM yang melakukan usahanya baik di pasar-pasar tradisional, maupun di kafe-kafe dan restoran yang menjajakan kebutuhan pokok sehari-hari, serta melakukan pengawasan atas berbagai perkantoran baik swasta maupun kantor-kantor pemerintah di Kota Cimahi, untuk tetap membatasi kunjungan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena kebijakan pelayanan di masa pandemi Covid-19, dapat dilakukan dengan aplikasi berbasis *on-line* dari rumah, tidak perlu harus bertatap muka secara langsung.

Kebijakan ini ditempuh Pemkot Kota Cimahi sesuai anjuran pemerintah untuk tetap bekerja, belajar dan beribadah dari rumah khususnya bagi daerah-daerah yang masih masuk zona merah Covid-19. Pemkot Cimahi dalam implementasinya dapat mengendalikan penyebaran Covid-19, di akhir tahun 2020, keberhasilan ini dikarenakan dalam penanganan Covid-19, terjalannya kerjasama antar jajaran

aparatur dengan baik, dan keterlibatan partisipasi Masyarakat yang sangat tinggi, sehingga semua dapat berjalan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

SARAN/REKOMENDASI

Dari hasil bahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan, walaupun implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Cimahi, telah berjalan dengan baik diantara Kabupaten/Kota di wilayah Bandung Raya, namun untuk dapat menangani permasalahan Covid-19, diperlukan adanya kerjasama antara 4 (empat) wilayah dalam Bandung Raya, karena kota Cimahi merupakan Kota Kecil dengan penduduk yang cukup padat, dimana lokasinya berada di tengah-tengah Kabupaten/kota di Bandung Raya, dan terdapat sebahagian pegawai Kota Bandung yang berdomisili di Kota Cimahi, sehingga apabila Kota Bandung masuk zona merah Covid-19, seharusnya perlu dilakukan adanya pembatasan dan penyekatan di wilayah perbatasan dengan membatasi ruang gerak Masyarakat dan dilakukan protokol kesehatan secara ketat, bagi warga Masyarakat yang lalu lalang setiap harinya. Guna mengantisipasi sedini mungkin adanya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Tidak hanya Kota Bandung saja, tetapi juga Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Yang berbatasan dengan kota Cimahi. Khususnya wilayah-wilayah zona merah di masing-masing Kabupaten/Kota di Bandung Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, I. (2012). "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125. Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar". *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). "Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 1-7. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5756>
- Pradana, G. A. (2016). "Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kapanjen)". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 78-86. Retrieved from <http://www.ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/604>
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tsabit, A., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). "Pengembangan Ganesha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal". *Jurnal Algoritma*, 9, 1-10. Retrieved from <http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/algoritma/article/view/16/16>
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Taufiqurrachman, *Kebijakan Fakultas Ilmu Politik*, Beragama Pers, Jakarta, 2014.

Browsing Internet

- <https://jabar.suara.com/read/2020/04/28/172256/>)
(<https://bandungkita.id/2020/04/16/>)
(<http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/03/19/4545/>).
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d4993499/>).
(<https://www.ayocirebon.com/read/2020/05/01/5303>

